



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**KECAMATAN GAMBUT**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani KM. 14.800 Gambut 70652  
Website : <https://kec-gambut.banjarkab.go.id> Email : [kec.gambut@banjarkab.go.id](mailto:kec.gambut@banjarkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT**  
**KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : 10.a TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT**  
**KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025**

**CAMAT GAMBUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Gambut perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Gambut.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
- 19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar;
- 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
- 21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024; dan
- 22. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GAMBUT TAHUN 2025
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Gambut Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambut  
pada tanggal 20 Januari 2025

**CAMAT GAMBUT**

**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**  
Pembina TK. I/ IV.b  
NIP. 19801125 200012 1 003

Lampiran I : Keputusan Camat Gambut  
Kabupaten Banjar

Nomor : 10.a Tahun 2025

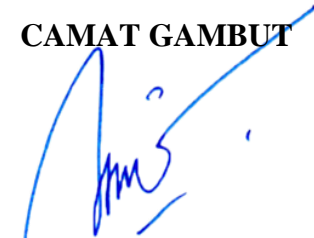
Tanggal : 20 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
CAMAT GAMBUT  
TAHUN 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yaitu : -kesesuaian persyaratan, -Prosedur pelayanan, -Kecepatan pelayanan, -Kewajaran biaya, -Kompetensi petugas, -Prilaku petugas pelayanan, -Penanganan pengaduan, -Kualitas sarana dan prasarana. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan	IKM = ((Jumlah Nilai Persepsi Unsur x 0,11)) x 25	CAMAT	KECAMATAN GAMBUT

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat SAKIP	Predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah penilaian yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kinerja dan akuntabilitasnya. Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi atau penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi	CAMAT	KECAMATAN GAMBUT
---	--	----------------	---	---	-------	------------------

CAMAT GAMBUT



**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**  
Pembina TK.I / IV.b  
NIP. 19801125 200012 1 003

Lampiran II : Keputusan Camat Gambut  
Kabupaten Banjar

Nomor : 10.a Tahun 2025

Tanggal : 20 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA  
KECAMATAN GAMBUT  
TAHUN 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Perencanaan Yang Berkualitas	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan (Komponen Perencanaan)	Suatu sistem yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah berdasarkan capaian dan hasil evaluasi kinerja pada komponen perencanaan	Nilai Absolut LHE Perencanaan Kinerja	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN GAMBUT
2	Meningkatnya Pengukuran Kinerja Yang Berkualitas	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan (Komponen Pengukuran)	Suatu sistem yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah berdasarkan capaian dan hasil evaluasi kinerja pada komponen pengukuran	Nilai Absolut LHE Pengukuran Kinerja	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN GAMBUT
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan (Komponen Pelaporan)	Suatu sistem yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah berdasarkan capaian dan hasil evaluasi kinerja pada komponen pelaporan	Nilai Absolut LHE Pelaporan Kinerja	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN GAMBUT
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Evaluasi	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan (Komponen Evaluasi)	Suatu sistem yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah berdasarkan capaian dan hasil evaluasi kinerja pada komponen evaluasi	Nilai Absolut LHE Evaluasi Internal	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN GAMBUT
5	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Suatu bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat atau pelanggan berdasarkan pedoman, aturan, atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan kepuasan penerima layanan	Jumlah pelayanan yang sesuai standar pelayanan dibagi jumlah seluruh pelayanan yang ada di kecamatan dikali 100%	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN GAMBUT

6	Meningkatnya Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Layanan Pengaduan ASN Lingkup Kecamatan Gambut adalah fasilitas yang disediakan oleh SKPD untuk menerima dan menangani keluhan, saran atau masukan dari ASN dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna layanan, meningkatkan kualitas kinerja SKPD dan memastikan kepuasan pengguna.	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi pengaduan yang masuk dikali 100%	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN GAMBUT
7	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Upaya perbaikan, pengembangan atau peningkatan kondisi sarana dan prasarana yang mendukung fungsi-fungsi tertentu.	Realisasi sarana dan prasarana yang baik dibagi jumlah sarana dan prasarana dikali 100%	SEKRETARIS CAMAT/Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN GAMBUT
8	Meningkatnya Kualitas ASN	1. IP ASN Dimensi Kompetensi	<p>IP ASN atau Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah alat untuk mengukur profesionalitas ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Indeks ini biasanya digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang diharapkan.</p> <p>IP ASN dimensi Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dengan pekerjaan.</p>	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	SEKRETARIS CAMAT/Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN GAMBUT

		2. IP ASN Dimensi Kualifikasi	<p>IP ASN atau Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah alat untuk mengukur profesionalitas ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Indeks ini biasanya digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang diharapkan.</p> <p>IP ASN dimensi kualifikasi mencakup Tingkat Pendidikan dan sertifikasi melalui pelatihan formal sesuai bidang tugasnya</p>	Nilai IP ASN dimensi kualifikasi	SEKRETARIS CAMAT/Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN GAMBUT
9	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses	Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kemudahan akses yang diperoleh masyarakat.	Jumlah pelayanan yang dikelola Kecamatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN GAMBUT
10	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah telah diimplementasikan secara efektif melalui mekanisme, unit, atau badan lain di luar struktur unit kerja di tingkat Kecamatan, dengan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara optimal	Jumlah urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dibagi Target urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dikali 100%	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN GAMBUT
11	Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan, Sinergi dan Sinkronisasi Kegiatan PD dan Instansi Vertikal	Persentase Koordinasi Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Sinergi dan sinkronisasi kegiatan PD dengan Instansi Vertikal	Pelimpahan kewenangan, sinergi, dan sinkronisasi antara perangkat daerah (PD) dengan instansi vertikal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan pelaksanaan yang optimal, hal ini dapat mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Sinergi dan sinkronisasi kegiatan PD dengan Instansi Vertikal dibagi target Koordinasi Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Sinergi dan sinkronisasi kegiatan PD dengan Instansi Vertikal dikali 100%	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN GAMBUT



12	Terlaksananya Sinergi dan Sinkronisasi Pelimpahan Kewenangan Kegiatan PD dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kegiatan PD dan Instansi Vertikal	Terlaksananya sinergi dan sinkronisasi dalam pelimpahan kewenangan antara perangkat daerah (PD) dan instansi vertikal adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ini memerlukan koordinasi yang baik serta kesepahaman dalam membagi peran dan tanggung jawab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kegiatan PD dan Instansi Vertikal	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN GAMBUT
13	Meningkatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diterapkan	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan adalah Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dijalankan atau dipatuhi dari keseluruhan SOP yang telah ditetapkan di Kecamatan	Jumlah SOP yang diterapkan dibagi Total SOP dikali 100%	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN GAMBUT
14	Meningkatnya Koordinasi dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Tingkat keberhasilan dan efektivitas koordinasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan	Jumlah Koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Target Koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dikali 100%	Kepala Seksi Pemerintahan	KECAMATAN GAMBUT

15	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	kondisi di mana sistem, prosedur, dan mekanisme administrasi pemerintahan di tingkat desa mengalami perbaikan signifikan, sehingga menghasilkan pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbaikan ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi, dan penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa	Jumlah desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	Kepala Seksi Pemerintahan	KECAMATAN GAMBUT
16	Meningkatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diterapkan	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan adalah Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dijalankan atau dipatuhi dari keseluruhan SOP yang telah ditetapkan di Kecamatan	Jumlah SOP yang diterapkan dibagi Total SOP dikali 100%	Kepala Seksi Pemerintahan	KECAMATAN GAMBUT
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Terasilitasi	Upaya-upaya pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat telah difasilitasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor lainnya	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat dibagi target pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat dikali 100%	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut

18	Meningkatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diterapkan	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan adalah Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dijalankan atau dipatuhi dari keseluruhan SOP yang telah ditetapkan di Kecamatan	Jumlah SOP yang diterapkan dibagi Total SOP dikali 100%	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut
19	Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Keterlibatan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dibagi laporan gangguan keamanan dan ketertiban dikali 100%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Gambut
20	Meningkatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diterapkan	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan adalah Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dijalankan atau dipatuhi dari keseluruhan SOP yang telah ditetapkan di Kecamatan	Jumlah SOP yang diterapkan dibagi Total SOP dikali 100%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Gambut

21	Meningkatnya Kualitas Media Pengaduan	Persentase Jenis Media Pengaduan	<p>Media pengaduan adalah sarana atau saluran yang disediakan oleh kecamatan berupa Media Pengaduan Langsung (Offline) ataupun Media Pengaduan Online (Digital), untuk menerima keluhan, masukan, atau laporan dari masyarakat, atau pengguna layanan Jenis Media pengaduan yang dimaksud :</p> <p>1. Media Pengaduan Langsung (Offline) Loket Pengaduan: Tempat khusus di instansi atau kantor pelayanan untuk menerima pengaduan secara langsung.</p> <p>Surat Tertulis: Pengaduan disampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan ke instansi terkait.</p> <p>Kotak Saran: Kotak fisik yang disediakan di tempat umum atau instansi untuk menampung keluhan atau saran dari masyarakat.</p> <p>Pertemuan Tatap Muka: Pengaduan disampaikan langsung kepada petugas atau pejabat yang berwenang melalui pertemuan resmi.</p> <p>2. Media Pengaduan Online (Digital) Website atau Portal Pengaduan, Aplikasi Mobile, Email, Pengaduan dikirim melalui surat elektronik ke alamat email resmi instansi, Formulir Online, dan Media Sosial: Pengaduan disampaikan melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, atau Instagram.</p>	Jumlah media pengaduan yang digunakan dibagi total media yang tersedia dikali 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	-------------------------------	------------------

		<p>3. Media Pengaduan Telepon Call Center, SMS atau WhatsApp:</p> <p>4. Media Pengaduan melalui Aplikasi Khusus Aplikasi Pelaporan Publik:</p> <p>5. Media Pengaduan melalui Lembaga atau Organisasi Ombudsman, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi non- pemerintah yang membantu masyarakat menyampaikan pengaduan, Posko Pengaduan.</p> <p>6. Media Pengaduan melalui Forum atau Konsultasi Publik Forum Warga, Konsultasi Publik</p> <p>7. Media Pengaduan melalui Surat Kabar atau Media Massa Rubrik Pengaduan:</p> <p>Kolom khusus di surat kabar atau media online untuk menerima dan mempublikasikan pengaduan masyarakat.</p> <p>Program Investigasi:</p> <p>Program televisi atau radio yang menyoroti masalah publik dan menerima pengaduan dari masyarakat.</p> <p>8. Media Pengaduan melalui Teknologi Terkini Chatbot, Voice Assistant</p>		
--	--	---	--	--

22	Meningkatnya Transparasi Informasi Pelayanan	Persentase Data atau Informasi Pelayanan yang update	Persentase Data yang memenuhi standar open data adalah proporsi data yang memenuhi kriteria Standar open data yang mengacu pada prinsip-prinsip yang memastikan data dapat diakses, digunakan dan dibagi secara bebas oleh siapapun. Data dimaksud meliputi urusan perencanaan, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	Jumlah data yang memenuhi Standar Open Data dibagi Jumlah Data yang tersedia dikali 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
23	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang Memadai	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	<p>Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai berarti bahwa fasilitas fisik dan infrastruktur yang dimiliki oleh kecamatan telah dijaga, dirawat, dan diperbaiki secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik</p> <p>Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat, perlengkapan, atau media untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana bersifat lebih spesifik dan langsung digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti Meja kursi, komputer, kendaraan dinas.</p> <p>Prasarana adalah fasilitas dasar atau infrastruktur yang mendukung keberlangsungan suatu kegiatan atau pelayanan. Prasarana bersifat lebih umum dan menjadi fondasi bagi sarana untuk dapat berfungsi dengan baik. yang antara lain meliputi gedung kantor, ruang pelayanan.</p>	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana yang tersedia dikali 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
24	Perencanaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan adalah Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan pada dokumen	Jumlah sarana dan prasarana sesuai DPA dibagi Jumlah sarana dan prasarana sesuai RKBMD dikali 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

				Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)			
25	Terkoordinir Dokumen Internal	Penyusunan Pengendalian	Persentase Dokumen Pengendalian Internal sesuai ketentuan	<p>Dokumen Pengendalian Internal adalah dokumen yang disusun untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal. Dokumen ini berisi Risk Regsiter, Rencana Tindak pengendalain dan laporan evaluasi. Dokumen pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk mengelola risiko, mencegah penyimpangan, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.</p> <p>Terkoordinirnya penyusunan dokumen pengendalian internal berarti bahwa proses penyusunan dokumen pengendalian internal dilakukan secara terorganisir, terstruktur, dan melibatkan koordinasi yang baik dengan semua pihak sehingga dokumen pengendalian yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KH)</p> <p>DOkumen pengendalian meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DOkumen SPIP : Risk Register RTP (Rencana Tindak Lanjut Pengendalian</li><li>- LAporan Penanganan Benturan Kepentingan</li></ul>	Jumlah dokumen pengendalian yang disusun dibagi Jumlah dokumen pengendalian sesuai ketentuan dikali 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut

26	Meningkatnya Transparansi Informasi Pelayanan	Persentase Data atau Informasi Pelayanan yang update	Meningkatkan transparansi informasi pelayanan adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan. Dengan transparansi, masyarakat memiliki akses yang lebih jelas terhadap informasi yang relevan, sehingga mempermudah mereka dalam mengambil keputusan atau mengakses layanan yang diperlukan.	Jumlah data atau informasi pelayanan yang update dibagi Jumlah data atau informasi yang dikelola dikali 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
27	Meningkatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diterapkan	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan adalah Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dijalankan atau dipatuhi dari keseluruhan SOP yang telah ditetapkan di Kecamatan	Jumlah SOP yang diterapkan dibagi Total SOP dikali 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
28	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut



29	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	Indikator kinerja yang mengukur proporsi dokumen-dokumen tersebut yang telah disusun dan diselesaikan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, dan digunakan untuk menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap standar yang ditetapkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah dikali 100%	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Kecamatan Gambut
30	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam penyajian, akurasi, kelengkapan, dan relevansi laporan yang disusun oleh kecamatan untuk menggambarkan hasil pencapaian kinerja selama periode tertentu. Laporan capaian kinerja adalah laporan yang dibuat untuk menyampaikan i sejauh mana tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah tercapai, serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun dibagi Total laporan capaian kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan dikali 100%	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Kecamatan Gambut
31	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Meningkatnya kualitas keuangan perangkat daerah berarti suatu kondisi di mana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berhasil mencapai dan mempertahankan standar kinerja keuangan yang lebih tinggi melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel serta kepatuhan terhadap regulasi dan tepat Waktu penyampiannya	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah dikali 100%	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Kecamatan Gambut

32	Meningkatnya Kualitas Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	<p>Meningkatnya kualitas laporan pengelolaan dan pengamanan aset barang milik daerah (BMD) perangkat daerah berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam penyajian, akurasi, kelengkapan, dan relevansi laporan yang disusun oleh perangkat daerah (SKPD) terkait pengelolaan dan pengamanan aset daerah serta aset tersebut diamankan dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan.</p> <p>Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan berarti laporan tersebut disusun dan disajikan berdasarkan aturan, standar, dan pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (KH)</p> <p>dokumen pengelolaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Persediaan</li> <li>- Kartu barang (KIB)</li> <li>- Berita Acara Serah Terima (BAST)</li> <li>- berita acaea pemeriksaan fisik barang</li> <li>- Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)</li> <li>- laporan persediaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang semesteran/ tahunan</li> <li>- dokumen pendukung terkait lainnya</li> </ul>	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset yang tersusun dibagi Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan dikali 100%	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Kecamatan Gambut
----	--	---	--	---	---	------------------

33	Terkoordinir Dokumen Internal	Penyusunan Pengendalian Internal	Persentase Dokumen Pengendalian Internal sesuai ketentuan	<p>Dokumen Pengendalian Internal adalah dokumen yang disusun untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal. Dokumen ini berisi Risk Regsiter, Rencana Tindak pengendalain dan laporan evaluasi. Dokumen pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk mengelola risiko, mencegah penyimpangan, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.</p> <p>Dokumen pengendalian meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen SPIP : Risk Register RTP (Rencana Tindak Lanjut Pengendalian</li> <li>- Laporan Penanganan Benturan Kepentingan</li> </ul>	Jumlah dokumen pengendalian yang disusun dibagi Jumlah dokumen pengendalian sesuai ketentuan dikali 100%	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Kecamatan Gambut
34	Tersedianya Dokumen SPIP		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen SPIP adalah dokumen resmi yang disusun untuk mencatat, mengatur, dan mengelola penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan dan memastikan efektivitas pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi.	Jumlah Dokumen SPIP yang tersusun	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Kecamatan Gambut
35	Terdapat Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited)		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited)	Laporan Keuangan SKPD Audited adalah Dokumen/Laporan resmi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan telah melalui proses audit oleh BPK. Laporan ini mencakup informasi keuangan yang telah diverifikasi untuk memastikan akurasi, kebenaran, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited)	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Kecamatan Gambut

36	Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Dokumen dan Perangkat	Jumlah Dokumen dan Penganggaran	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah adalah seperangkat dokumen yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang meliputi dokumen Renja, Renstra, RKA, ROPK, PK dll	Jumlah Dokumen dan Penganggaran	JF Perencana	Kecamatan Gambut
37	Terlaksananya Penginputan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Sistem Informasi yang Terinput Sesuai Ketentuan	Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah adalah platform atau sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (SKPD) dalam pemerintahan daerah. untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. yang meliputi, SIPD RI, Simondalev, SIPD Langkar  Penginputan adalah proses memasukkan data, informasi, dan dokumen ke dalam sistem informasi yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah data atau informasi yang terinput dibagi jumlah data yang tersedia dikali 100%	JF Perencana	Kecamatan Gambut	
38	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Triwulan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan Perangkat Daerah	Laporan capaian kinerja Triwulan adalah laporan yang dibuat untuk menyampaikan pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja setiap triwulan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan Perangkat Daerah	JF Perencana	Kecamatan Gambut	

39	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Laporan capaian kinerja Triwulan laporan yang dibuat untuk menyampaikan i pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja periode satu tahun sebagai dokumen pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	JF Perencana	Kecamatan Gambut
40	Terdapat Laporan penutupan kas	Jumlah Laporan Penutupan Kas	Laporan penutupan kas adalah dokumen yang mencatat seluruh transaksi kas yang terjadi selama periode tertentu dan menghitung saldo akhir kas pada akhir periode tersebut. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo kas di buku sesuai dengan saldo kas fisik yang ada.	Jumlah Laporan Penutupan Kas	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan dan Aset / Bendahara	Kecamatan Gambut
41	Terdapat Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan/ Semester/Tahunan APBD	Jumlah Dokumen/Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan/ Semester/Tahunan APBD	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan/Semester/Tahunan SKPD adalah Dokumen/Laporan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggambarkan pencapaian realisasi anggaran dalam periode triwulan, semester, atau tahunan.	Jumlah Dokumen/Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan/ Semester/Tahunan APBD	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan dan Aset / Bendahara	Kecamatan Gambut
42	Terlaksananya Transaksi Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Terlaksananya Transaksi Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah kondisi di mana proses pembayaran dilakukan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun, diverifikasi, dan disetujui	Jumlah Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan dan Aset / Bendahara	Kecamatan Gambut

43	Tersedianya Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen resmi yang mencatat langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan SKPD. Laporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penangan Benturan Kepentingan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Seksi Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
44	Tersedianya Laporan Pengaduan	Jumlah Laporan Pengaduan	Laporan Pengaduan adalah dokumen atau informasi tertulis yang berisi tentang suatu keluhan, masalah, ketidakpuasan dan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat	Jumlah Laporan Pengaduan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Seksi Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
45	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	Prasarana Teknologi Informasi yang tersedia adalah semua infrastruktur pendukung yang memungkinkan sistem TI beroperasi, mulai dari jaringan, server, daya listrik dan fasilitas fisik	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	Pengadministrasi Perkantoran Sub Seksi Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
46	Tersedianya Data yang Dikelola	Jumlah data yang Dikelola	Data yang dikelola meliputi urusan perencanaan, pemerintahan umum. pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	Jumlah data yang Dikelola	Pengadministrasi Perkantoran Sub Seksi Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
47	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pengadministrasi Perkantoran Sub Seksi Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut

48	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan adalah langkah fundamental untuk memperkokoh rasa cinta tanah air, kesadaran bernegara, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah yaitu adalah pelaksanaan HUT RI	Jumlah Laporan Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Pengandminstrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Kecamatan Gambut
49	Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan PD di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi	Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan PD di Kecamatan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Seperti : - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa - Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi	Pengandminstrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Kecamatan Gambut
50	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pengandminstrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Kecamatan Gambut

51	Terlaksananya Usulan dari Masyarakat, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Usulan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya usulan dari masyarakat, pemerintah kelurahan, dan kecamatan adalah proses yang mencerminkan keterlibatan aktif semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadi salah satu wujud demokrasi partisipatif, di mana suara masyarakat diakomodasi untuk menciptakan kebijakan atau program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Jumlah Usulan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	Pengadminstrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut
52	Terlaksananya Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan	Jumlah Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Pengadminstrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut
53	Terlaksananya Pra dan Musrenbang kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg mengikuti Musrenbang	<p>- Pra Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kecamatan adalah tahap persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan, yang melibatkan berbagai pihak untuk menyusun usulan program dan kegiatan pembangunan</p> <p>- Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah yang diselenggarakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan, serta untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan.</p>	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg mengikuti Musrenbang	Pengadminstrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut
54	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan)	Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program pemberdayaan secara mandiri	Jumlah Laporan Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan)	Pengadminstrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut



55	Terlaksananya fasilitasi pembinaan PKK	Jumlah Laporan Fasilitasi pembinaan PKK	Fasilitasi pembinaan PKK adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan organisasi PKK di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan, agar dapat berfungsi secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal kesejahteraan keluarga. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kapasitas anggota PKK agar dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga di komunitas mereka.	Jumlah Laporan Fasilitasi pembinaan PKK	Pengadminstrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut
56	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pengadminstrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut

57	Terlaksananya Fasilitasi Penangan Konflik sosial sesuai ketentuan per UU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial sesuai dg Peraturan Perundang-Undangan)	Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat dengan merujuk pada prinsip-prinsip, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari fasilitasi ini adalah untuk memastikan bahwa penanganan konflik sosial dilakukan secara sah, adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial sesuai dg Peraturan Perundang-Undangan)	Pengandminstrasi Perkantoran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gambut
58	Terlaksananya Fasilitasi FKUB di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan fasilitasi FKUB di tingkat Kecamatan	Fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di tingkat kecamatan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB dalam membina dan menjaga kerukunan antar umat beragama di tingkat kecamatan. Fasilitasi ini mencakup penyediaan dukungan administratif, teknis, dan sumber daya lainnya agar FKUB dapat menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan sosial, mengatasi potensi konflik antar umat beragama, serta memfasilitasi dialog dan kerja sama antar agama.	Jumlah Laporan fasilitasi FKUB di tingkat Kecamatan	Pengandminstrasi Perkantoran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gambut

59	Terlaksananya Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)	Jumlah Laporan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)	Terlaksananya Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) adalah suatu kondisi di mana terdapat pertemuan dan koordinasi yang terstruktur antara unsur pimpinan kecamatan, seperti Camat, Kapolsek, Danramil, serta perwakilan instansi lainnya, dalam rangka membahas isu-isu strategis, merumuskan kebijakan, serta mengoordinasikan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketertiban, dan pembangunan di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)	Pengandminstrasi Perkantoran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gambut
60	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pengandminstrasi Perkantoran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gambut

**CAMAT GAMBUT**

**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**

Pembina TK. I / IV.a  
NIP. 19801125 200012 1 003